

Judul : Indeks korupsi turun 3 poin, komisi III: momentum evaluasi strategi pemberantasan korupsi
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Indeks Korupsi Turun 3 Poin

Komisi III: Momentum Evaluasi Strategi Pemberantasan Korupsi

Senayan menyoroti laporan Transparency International Indonesia (TII) yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025 melorot di skor 34. Turun 3 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 37.

ANGGOTA Komisi III DPR Hasbiullah Ilyas menilai, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Penurunan skor dan peringkat IPK menunjukkan persepsi terhadap korupsi di Indonesia masih buruk.

Dia meminta laporan yang disampaikan TII ini tidak bisa dianggap angin lalu saja. Skor 34 dan turunnya peringkat Indonesia harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. "Ini menunjukkan indeks persepsi korupsi kita masih sangat buruk, bahkan setara dengan Nepal," ujarnya, kemarin.

Diketahui dalam laporan TII, Indonesia menempati peringkat 109 dari 180 negara yang disurvei. Posisi ini merosot dibandingkan tahun 2024, di mana Indonesia berada di peringkat 99. Bahkan, skor Indonesia kini sejajar dengan sejumlah negara seperti Aljazair, Nepal, Malawi, Sierra Leone, Laos, dan Bosnia

& Herzegovina.

Hasbi melanjutkan kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan. Pemerintah, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya, kudu segera menyusun road map pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

"Tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat pencegahan secara sistematis," tegas politikus PKB ini.

Selain itu, ia mendorong KPK dan aparat penegak hukum lainnya untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi antikorupsi kepada masyarakat. Penguatan budaya antikorupsi harus dimulai dari peningkatan kesadaran publik. Sosialisasi dan pendidikan antikorupsi juga harus digen- carikan, baik di lingkungan



Hasbiullah Ilyas

pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat luas. "Tanpa kesadaran kolektif, upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif," kata mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini.

Komisi III DPR, lanjut Hasbi, akan terus mendorong penguatan regulasi dan pengawasan agar agenda pemberantasan korupsi berjalan lebih optimal dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.

Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta menambahkan, merosotnya skor IPK Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan dan penindakan

korupsi di tanah air. Laporan ini sebagai konfirmasi atas suramnya reformasi birokrasi saat ini.

Parta mengatakan, instrumen pemberantasan korupsi yang ada saat ini belum mampu membendung praktik lancung yang telah merambah ke berbagai lini. Mulai dari tingkat desa hingga nasional, bahkan menyentuh institusi peradilan dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Dibutuhkan perubahan reformis dan struktural di berbagai segmen. Juga peran DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan dan anggaran," ujar Parta di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Selain itu, Parta menyoroti keterbatasan DPR dalam mengawasi penggunaan APBN pasca-Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang menghapus kewenangan legislatif dalam membahas anggaran hingga satuan 3 (rincian program dan alokasi pagu per program). Akibatnya, DPR kini hanya menerima dokumen anggaran dalam bentuk umum.

Politikus PDIP ini mencontohkan, kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Jika DPR memiliki kewenangan

mengawasi hingga Satuan 3, potensi penyimpangan harga satuan bisa dideteksi sejak awal.

Bagaimana tanggapan KPK? Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berharap, semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan untuk koreksi, introspeksi dan akselerasi pemberantasan korupsi ke depan secara kolektif.

Introspeksi perlu dilakukan karena IPK merupakan cerminan kepercayaan publik terhadap komitmen nasional dalam memerangi praktik korupsi. "Juga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," ujar Budi di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Budi berharap, setiap progresivitas penegakan hukum oleh KPK ditindaklanjuti dengan komitmen dan langkah nyata seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan persoalan korupsi tidak kembali terjadi.

Tak hanya sebagai introspeksi, setelah indeks persepsi korupsi disampaikan, dia berharap ada tindak lanjut konkret untuk menekan praktik korupsi yang hingga kini kian masif. "Hal ini menandakan komitmen perbaikan pada ranah pencegahan masih harus ditingkatkan," pungkasnya. ■ TIF